

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Laba

Laba merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Informasi tentang laba mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Laba menjadi salah satu informasi penting yang menunjukkan gambaran kegiatan atau usaha guna memajukan perusahaan. Informasi laba yang terkandung di dalam laporan keuangan sangat penting bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Intervensi dan mengelabui yang dilakukan oleh pihak manajemen dipakai sebagai dasar untuk melakukan manajemen laba sebagai bentuk kecurangan dalam perusahaan [15].

Manajemen laba adalah semua tindakan yang digunakan oleh para manajer untuk memengaruhi laba dengan cara meninggi-ninggikan atau merendah-rendahkan laba sesuai dengan tujuannya. Manajemen dapat memengaruhi pembebanan biaya, pengakuan pendapatan dan laba dengan cara mempercepat atau menundanya agar laba sesuai dengan yang diharapkan oleh para manajer. Dalam hal ini manajemen laba akan berpengaruh terhadap tingkat laba dalam laporan keuangan perusahaan baik itu labanya tinggi maupun rendah [16].

Ada dua perspektif yang digunakan oleh manajer untuk menjelaskan mengapa perusahaan melakukan manajemen laba yaitu dengan perspektif informasi dan oportunistik. Pertama, perspektif informasi menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan dimasa depan. Kedua, perspektif oportunistik merupakan upaya manajer untuk mempengaruhi informasi yang disajikannya dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan orang lain mengenai informasi yang sebenarnya [15].

Ada beberapa motivasi yang mendorong manajer perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu [15] :

1. Motivasi bonus (*bonus scheme*)

Motivasi bonus merupakan dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba yang dilaporkannya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba. Jika laba lebih rendah dari pada target yang ditetapkan maka akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dengan cara mentransfer laba masa depan menjadi laba sekarang dengan harapan akan memperoleh bonus.

2. Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*)

Perusahaan yang melanggar kontrak hutang secara signifikan akan menaikkan labanya. Ketika perusahaan dekat kepada waktu pelanggaran perjanjian hutang, manajer cenderung memilih metode pencatatan akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan agar dapat memperoleh dan menaikkan laba.

3. Motivasi politik (*political motivation*)

Motivasi politik merupakan motivasi yang muncul karena manajer berperilaku oportunistik dengan memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual. Pemilihan metode akuntansi akan memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang dilaporkan. Manajer akan menurunkan laba perusahaan dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak agar relatif lebih rendah.

4. Motivasi perpajakan (*taxation motivation*)

Perpajakan merupakan salah satu motivasi manajer untuk mengurangi laba yang akan dilaporkan perusahaan. Manajer akan berusaha agar laba perusahaan selalu kelihatan lebih rendah dari pada laba yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan oleh pihak manajer untuk meminimalisir pajak atau nilai pajak yang harus dibayar perusahaan

5. Pergantian *Chief Executive Officer* (CEO)

CEO (*Chief Executive Officer*) yang masa kontraknya akan berakhir cenderung akan memaksimalkan pelaporan laba untuk mendapatkan jumlah bonus lebih besar, dengan cara menaikkan laba masa depan agar positif. Manajer akan

melakukan berbagai strategi untuk memaksimalkan laba sebagai upaya untuk menaikkan bonus.

6. Penawaran saham perdana (*initial public offering*)

Penawaran saham perdana (*initial public offering*) merupakan penawaran saham suatu perusahaan private yang pertama kalinya ditawarkan kepada publik. Perusahaan memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan penerimaan melalui pengaturan tingkat laba yang dilakukan, sehingga perusahaan melaporkan labanya lebih tinggi (*overstate*) dibandingkan laba yang sebenarnya saat penawaran IPO.

Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba yang dihubungkan oleh tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan. Tiga hipotesis tersebut menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu [15]:

1. *Bonus plan hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan menggunakan *bonus plan* cenderung akan mengelola dan mengatur labanya agar dapat menerima bonus. Manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat maksimal untuk memperoleh bonus. Upaya ini membuat manajer cenderung akan selalu memperoleh bonus dari periode ke periode.

2. *Debt (equity) hypothesis*

Dalam hipotesis perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutang yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikan pada periode-periode mendatang.

3. *Political cost hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan regulasi pemerintah yang harus dipenuhi perusahaan selama periode tertentu. Besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah tergantung dari besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Kondisi inilah yang membuat manajer mengelola dan mengatur labanya pada jumlah

tertentu, agar pajak yang dibayarkannya tidak menjadi terlalu tinggi. Selain itu, upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pajak adalah dengan memperlmainkan laba pada saat pergantian undang-undang. Perusahaan akan menunda pengakuan laba periode berjalan dan akan mengakuinya pada saat peraturan baru diberlakukan.

Dalam melakukan manajemen laba, manajer dapat memperlmainkan besar kecilnya laba dengan cara menyembunyikan atau mengubah metode dan prosedur akuntansi, mengubah nilai estimasi, atau pun tidak mengungkapkan kewajibannya, sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya. Meskipun terkesan hanya memperlmainkan besar kecilnya angka-angka dalam laporan keuangan, hal ini dilakukan manajer karena keinginannya untuk menyembunyikan sesuatu agar tidak diketahui pihak lain. Upaya ini dilakukan manajer dengan tujuan untuk melindungi kecurangan-kecurangan yang telah dilakukannya demi kepentingan pribadinya tanpa melihat kepentingan pihak lain. Inilah yang menyebabkan manajemen laba cenderung melanggar peraturan yang telah ditetapkan sesuai PSAK, sehingga manajemen laba disebut sebagai kecurangan manajerial [15].

Ada tiga teknik yang dilakukan manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu [15]:

a. Mengubah berbagai estimasi akuntansi,

Perusahaan dapat mengelabui pemakaian laporan keuangan dengan cara mengubah estimasi akuntansi seperti estimasi umur ekonomis aktiva tetap dan aktiva tak berwujud, estimasi biaya kerugian piutang, dan lain-lain. Pada dasarnya manajer menggeser biaya sekarang menjadi biaya periode masa depan dan pendapatan periode masa depan menjadi pendapatan sekarang agar laba yang dilaporkan lebih tinggi dari laba sesungguhnya, begitu juga sebaliknya sehingga perusahaan dapat merekayasa labanya menjadi lebih besar atau lebih kecil.

b. Mengubah atau mengganti metode akuntansi, dan

Perubahan metode akuntansi digunakan manajer untuk mengelabui pemakaian laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan cenderung tidak mengetahui kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Upaya mengubah metode akuntansi yang dilakukan manajer membuat nilai

perusahaan akan meningkat dimata *stakeholder* yang secara langsung akan meningkatkan harga saham perusahaan.

c. Permasalahan cadangan

Cadangan (*reserves*) merupakan laba yang ditarik kebelakang dari periode pengakuan sebelumnya dan digunakan pada saat dibutuhkan; seperti cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, pada saat menginginkan labanya menjadi tinggi maka perusahaan dapat menggunakan cadangan itu untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan perusahaan.

Berdasarkan model empiris, ada beberapa model yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu model *Healy*, model *De Angelo*, model *Jones*, model *Jones* dimodifikasi (*modified Jones model*). Dalam penelitian ini manajemen laba diproksikan dengan *Discretionary Accruals* (DAC) dengan menggunakan perhitungan model *Jones* modifikasian (*modified jones model*). Model ini merupakan modifikasi dari model *Jones* yang dibuat untuk mengeliminasi kecenderungan dengan menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model *Jones*, dimana dapat menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Apabila *earnings* dikelola dengan menggunakan pendapatan *discretionary*, maka model ini akan menghapus bagian laba yang dikelola untuk proksi *discretionary accruals*. Ada empat langkah untuk menghitung nilai *Discretionary Accruals* (DAC), yaitu sebagai berikut [15]:

1. Menghitung *Total Accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi perusahaan dan setiap tahun pengamatan, dengan menggunakan rumus :

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

2. Mengestimasi *Total Accrual* (TAC) dengan *cross-sectional Ordinary Least Square* (OLS) untuk mendapatkan koefisien regresi, dengan menggunakan rumus adalah:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \epsilon$$

Regresi terhadap tiga komponen ini menghasilkan nilai a_1 dan a_2 yang digunakan untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals*.

3. Menghitung *Nondiscretionary Accruals* (NDA) dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) - \left(\frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

4. Langkah terakhir adalah menghitung *Discretionary Accruals* (DA)

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it} \quad (2.1)$$

Keterangan :

| | |
|--------------------------------|--|
| TAC | : Total akrual yang diskala dengan total aktiva |
| NI_{it} | : <i>Net Income</i> periode berjalan |
| CFO_{it} | : <i>Cash Flows From operations</i> |
| PPE_{it} | : <i>Gross property, plant, and equipment</i> periode berjalan |
| NDA_{it} | : <i>Nondiscretionary Accruals</i> |
| TA_{it} | : Total aktiva periode periode berjalan |
| $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ | : <i>Firm-specific parameters</i> |
| ϵ | : <i>Error Term</i> |

2.1.2 Perencanaan Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara Indonesia yang terbesar. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara ilegal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak [17]

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah

kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal. Hal ini merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyeludupan pajak [18].

Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan pembayaran pajak (motivasi perencanaan pajak), yaitu sebagai berikut [18] :

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)

Desengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi (*Probability of detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat profitabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya Denda (*Size of penalty*)

Makin berat sanksi perpaakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas

pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan semakin besar.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu [18]:

1. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi (*capitalization*) adalah pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
3. Transformasi (*trasformation*) adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Penggelapan atau Penyeludupan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
5. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
6. Pengecualian pajak (*tax exemption*) adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang-undang pajak.

Tujuan perencanaan pajak secara umum adalah sebagai berikut [18] :

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - 1) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan penjara.
 - 2) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan, undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuanganm seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22 dan pasal 23).

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak dilakukan secara cermat, yaitu sebagai berikut [18]:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Dari sudut pandang teoritis, suatu penghasilan diperoleh pada saat timbulnya perbedaan harga atau kenaikan harga suatu asset. Namun apabila ditinjau, baik dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun dari segi praktik akuntansi, suatu penghasilan baru direkognisi sebagai penghasilan pada saat asset tersebut dijual atau dipindahtangankan. Menunda rekognisi penghasilan sampai dengan pengalihan asset tersebut, secara praktis dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan penghematan pajak. Walaupun kenaikan harga asset tersebut dapat dihitung secara objektif, namun karena kenaikan tersebut tidak mengakibatkan keuntungan untuk membayar pajak, maka atas kenaikan tersebut

tidak ada pajak yang dipindahtangankan. Persyaratan pengenaan pajak apabila telah dijual atau dipindahtangankan, dari sudut pandang ekonomi, merupakan kekurangan yang konseptual yang dapat digunakan sebagai peluang bagi perencanaan pajak [19].

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak, yang diukur untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan tahun berjalan. Perencanaan pajak dalam penelitian ini menggunakan *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yaitu persentase pendapatan sebelum pajak dengan laba bersih. Dalam penelitian ini perencanaan pajak dirumuskan dengan [20]:

$$TRR_{it} = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

TRR : *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan tahun berjalan

Net Income_{it} : Laba bersih perusahaan tahun berjalan

Pretax Income : Laba sebelum pajak perusahaan tahun berjalan

2.1.3 Beban Pajak Tangguhan

Akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK Nomor 46 dimana beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pada prinsipnya pajak tangguhan merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan. Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi yaitu laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal dengan laba fiskal yaitu laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Perbedaan temporer yang dimaksud yaitu sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak dari aset atau kewajiban yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah atau berkurang pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dibayar [21].

Pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisi kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan

pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Pengakuan terhadap aset dan kewajiban pajak tangguhan berlandaskan fakta kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan kewajiban/pembayaran yang menjadi lebih besar atau kecil pada periode mendatang dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak [21].

Penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (PPH) dengan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang, dapat dikategorikan dalam lima kelompok berikut ini [19]:

1. Perbedaan Permanen/Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiod (*Interperiod Income Tax Allocation*), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya (*counterbalance*).

2. Perbedaan Waktu/Sementara (*Timing Differences = Temporary Differences*)

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan waktu dapat berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah pajak (*taxable amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *taxable temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (pasal 17), maka akan terdapat *future tax liability* yang sama dengan *deferred tax liability*.

b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *deductible temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat *future tax refundable*. Jumlah *future tax refundable* dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah *deffered tax asset*.

3. Kompensasi Kerugian (*Operating Loss Carryforwards*)

Secara komersial tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian terjadi.

4. Kredit Pajak Investasi (*Investment Tax Credit*)

Apabila suatu perusahaan membeli atau mengkonstruksi suatu aset tertentu, maka sejumlah persentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut dapat dikreditkan (dikurangkan) dari PPh Terutang pada tahun perolehan aset tersebut. Kredit Pajak Investasi tersebut tidak menyebabkan perbedaan antara Penghasilan sebelum pajak dengan Penghasilan Kena Pajak, tetapi akan terdapat perbedaan antara Beban Pajak dan PPh terutang.

Catatan: Indonesia tidak ada ketentuan ini.

5. Alokasi Pajak Interperiode (*Interperiod Tax Allocation*)

Untuk keperluan laporan keuangan komersial, sejumlah Pajak Penghasilan dibagikan ke:

- a. Penghasilan operasional berkelanjutan
- b. Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut
- c. Hal-hal luar biasa
- d. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan keuangan
- e. Penyesuaian dengan periode terdahulu

Kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut [19]:

- a. Penghasilan yang sebelum pajak-PSP (*Pretax Accounting Income*) lebih besar dari penghasilan kena pajak-PKP (*Taxable Income*), maka beban pajak-BP (*tax Expense*) pun lebih besar dari pajak terutang-PT (*Deferred Taxes Liability*). Kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku.
- b. Penghasilan yang sebelum pajak (PSP) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka beban pajak (BP) juga lebih kecil dari pajak terutang (PT), hal ini akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*). Aktiva pajak tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan

Beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan [22].

Kenaikan saldo liabilitas pajak dari awal hingga akhir periode akuntansi yang ditangguhnya disebut dengan *Deferred Tax Expense*. *Deferred Tax Expense* merupakan beban yang timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Beban pajak tangguhan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Deferred Tax Expense*, yaitu dengan membandingkan total beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total asset tahun sebelumnya [23].

Dalam penelitian ini beban pajak tangguhan dirumuskan dengan [23]:

$$DTE = \frac{\text{Deferred Tax Expense it}}{\text{Total Asset it-1}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

DTE : Beban pajak tangguhan perusahaan

Deferred Tax Expense it : Beban pajak tangguhan perusahaan pada tahun berjalan

Total Asset it-1 : Total aset perusahaan pada tahun sebelumnya

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan sebuah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan logaritma dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan pada akhir periode. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan besar mempunyai risiko yang lebih rendah dari pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga perusahaan besar mampu menghadapi persaingan ekonomi. Penggunaan logaritma dalam pengukuran dilakukan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan untuk menghaluskan besarnya angka [13].

Perusahaan besar dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang besar, sehingga relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dan tidak mudah bangkrut. Perusahaan besar mempunyai konsekuensi yang lebih besar apabila terjadi kebangkrutan, sehingga kemungkinan adanya campur tangan pemerintah untuk membantu juga besar. Hal ini diduga dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar bagi para investor [24].

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil [25].

Pada dasarnya ukuran perusahaan diklasifikasikan kedalam 4 kategori yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 pasal 1, yaitu [26]:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut [26]:

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang dipertimbangkan dalam banyak penelitian keuangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya dugaan keputusan/hasil keuangan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Secara umum biasanya *size* diproksikan dengan total asset. Karena nilai total asset biasanya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya, maka untuk mengurangi peluang heteroskedastisitas, variabel aset diperhalus menjadi Log (asset) atau Ln (Asset) [27].

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dirumuskan dengan [27]:

$$Ln = \text{Total asset} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Ln : Logaritma natural

2.1.5 *Leverage*

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang dengan memakai semua aset atau aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Rasio solvabilitas atau *leverage* adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau likuidasi. Sebesar apa beban utang yang ditanggung perusahaan akan dibandingkan dengan aktivasnya [28].

Leverage dapat diartikan sebagai daya ungkit dari biaya tetap operasi dan beban tetap finansial atas penggunaan modal asing untuk meningkatkan keuntungan. Kenyataan menunjukkan bahwa penyebab utama dari kebangkrutan atau likuiditasi

beberapa perusahaan di dunia adalah ketidakmampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman (modal asing) mereka kepada kreditur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa modal asing memiliki daya ungkit (*leverage*) terhadap tingginya tingkat keuntungan atau kerugian bagi investasi yang didanai [29].

Analisis *leverage* merupakan salah satu dari jenis analisis hubungan biaya-volume-laba yang menitikberatkan kepada fungsi dari biaya tetap sebagai pengungkit laba perusahaan. Tingkat *leverage* mencerminkan tingkat resiko. *Leverage* yang dirasakan manfaatnya oleh perusahaan dalam hal mendongkrak laba perusahaan hanya ketika terjadi peningkatan volume kegiatan/ penjualan. Risiko yang ditimbulkan oleh *leverage* adalah jika yang terjadi adalah penurunan volume penjualan yang menjadikan *leverage* (biaya tetap) justru memperparah beban dengan memperbesar jumlah penurunan laba secara signifikan atau bahkan kerugian. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis *leverage* terutama bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan investasi khususnya ke dalam aktiva tetap, keputusan pendanaan khususnya terhadap penggunaan sumber pendanaan dari utang, dan keputusan operasional dalam hal penetapan harga jual produk [30].

Adapun tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* yaitu [28]:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki

Leverage dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* atau yang disebut juga dengan *Debt Ratio*,

merupakan perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman, karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. [14].

Debt to Asset Ratio yaitu rasio total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan utang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh utang. Rumusnya adalah total kewajiban dibagi total aktiva. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka semakin kecil perusahaan dibiayai dari utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri sejenis [31].

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) atau yang dikenal juga dengan *Debt Ratio*. *Debt to Assets* atau *Debt Ratio*, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan membandingkan antara total utang dengan total aktiva. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki [32].

Dalam penelitian ini *leverage* dirumuskan dengan [14]:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.5)$$

2.1.6 Kepemilikan Institutional

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat memengaruhi kinerja suatu perusahaan. Kepemilikan perusahaan dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme yang dapat mengendalikan masalah keagenan yang ada di suatu perusahaan [33].

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan [33].

Investor institusional adalah perusahaan-perusahaan yang berinvestasi atas nama individu dan perusahaan. Mereka yang juga memenuhi syarat untuk menjadi keanggotaan dan termasuk dana pensiun, reksadana, asuransi perusahaan, dan bank. Karena mereka mendatangkan volume yang luar biasa dari perdagangan harian. Kepemilikan institusional merupakan badan hukum. Bentuk hukum yang tepat bisa bervariasi antara investor institusi dan mencakup segala sesuatu dari memaksimalkan keuntungan bersama secara langsung melalui kepemilikan bersama saham perusahaan untuk perseroan terbatas berbentuk kemitraan dan penggabungan undang-undang khusus [34].

Keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan. Keterlibatan investor institusional dalam melakukan fungsi monitoring terhadap manajemen dapat mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan. Aktivitas monitoring yang dilakukan oleh institusional mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, sebaliknya jika investor institusional tidak dapat berperan dengan efektif, maka kepemilikan

institusional dapat menurunkan nilai perusahaan. Dampak dari kepemilikan institusional dapat berdampak positif maupun negatif. Hal ini sangat tergantung dari tujuan investasi institusi serta karakteristik institusi itu sendiri [35].

Berikut ini beberapa cara untuk mengidentifikasi berbagai *institusional arrangements* yang diperlukan dalam mendukung kesuksesan implementasi governance, yaitu [36] :

1. Diperlukan sistem hukum yang andal termasuk sistem pengendalian yang independen dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pertimbangan yang sehat dan dapat ditegakkan, serta bebas dari intervensi pemerintah dan politik.
2. Dibutuhkan pasar modal yang likuid, memenuhi standard dan kualifikasi internasional serta mendorong munculnya investor institusi.
3. Ketersediaan lembaga keuangan yang andal, termasuk stock brokers, dukungan terhadap proses penambahan saham baru dan financial advisers.
4. Penguatan otoritas regulator pasar keuangan (terutama pasar modal) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.
5. Dorongan untuk, enfasilitasi pengungkapan informasi yang komprehensif dengan tingkat transparansi yang semakin tinggi.
6. Terdapatnya asosiasi profesi akuntan dan asosiasi profesi legal yang memiliki putasi dan diakui secara internasional, mampu untuk mendisiplinkan anggota para klien mereka, dan menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kebutuhan dalam mendukung implementasi CG yang sehat.
7. Diperlukan akuntan publik yang profesional, andal, dan mampu menjagain dependensi profesi dengan klien mereka.
8. Ketersediaan organisasi professional seperti BOD/Dewan Komisaris dan Sekretaris perusahaan dengan kualifikasi tinggi yang relevan.
9. Ketersediaan lembaga pendidikan profesi yang mampu untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang CG untuk kualifikasi relevan.
10. Organisasi konsultan yang mampu dan andal dalam memberikan advis kepada perusahaan dan dewan komisaris.
11. Tersedianya pelatihan keuangan dan CG serta pengembangan pendidikan professional yang berkelanjutan.

12. Ketersediaan hasil riset dan publikasi hasil riset terkait isi CG, baik berupa implikasi kebijakan CG maupun hasil penelitian empiris yang dapat diterapkan.

Berikut ini beberapa persyaratan kepemilikan saham yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Pasal 2 (1) dan (2), yaitu [37]:

1. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap pihak yang memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5 % (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka.

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan [38].

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional dirumuskan dengan [38]:

$$Inst = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100 \% \quad (2.6)$$

2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas adalah hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu organisasi. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi perusahaan [32].

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk menghasilkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang.

Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya [39].

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas adalah rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi/ keuntungan. Keuntungan adalah hasil akhir dari kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen. Rasio keuntungan akan digunakan untuk mengukur keefektifan operasi perusahaan, sehingga menghasilkan keuntungan pada perusahaan [14].

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan [39].

Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan, yaitu [39]:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA), yaitu diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset. ROA mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara bagian komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan atau neraca. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi [39].

ROA merupakan salah satu jenis profitabilitas yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil *return on asset* berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil *return on asset* berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset [39].

Dalam penelitian ini profitabilitas dirumuskan dengan [39]:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.7)$$

2.2 Review Peneliti Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba sebagai variabel dependen dalam penelitian, antara lain:

1. Fibria Anggraini Puji Lestari

Fibria Anggraini Puji Lestasi melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen

Laba”. Objek penelitian ini adalah perusahaan minyak bumi di Indonesia yang terdaftar di BEI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dengan total sampel diambil sebanyak 10 perusahaan berdasarkan kriteria dan harus memenuhi semua kriteria. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan profitabilitas dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan profitabilitas dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba [5].

2. Hendy Suyoto, Susi Dwimulyani

Hendy Suyoto, Susi Dwimulyani melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Leverage* dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Normalitas Data Residual Setelah Uji Outlier, Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis, pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan total sampel diambil sebanyak 116 perusahaan berdasarkan kriteria dan harus memenuhi semua kriteria. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan *leverage* dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Profitabilitas mampu memperlemah pengaruh negatif *leverage* terhadap manajemen laba dan profitabilitas tidak dapat memoderasi hubungan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba [4].

3. Irsan Lubis, Suryani

Irsan Lubis, Suryani melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Tax Planning, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda,

pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan total sampel diambil sebanyak 55 perusahaan berdasarkan kriteria dan harus memenuhi semua kriteria. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan *tax planning*, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan *tax planning* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba sedangkan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [6].

4. Lindira Sukma Dewi, I Ketut Budiarta, I.D.G Dharma Suputra

Lindira Sukma Dewi, I Ketut Budiarta, I.D.G Dharma Suputra melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi Pengaruh *Tax, Leverage* dan *Firm Size* pada *Earnings Management*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dan uji interaksi, pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan total sampel diambil sebanyak 48 perusahaan berdasarkan kriteria dan harus memenuhi semua kriteria. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan *tax, leverage* dan *firm size* berpengaruh terhadap *earnings management*. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan *tax, leverage* dan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *earnings management*. Kebijakan dividen memoderasi dan memperkuat pengaruh positif *leverage* pada *earnings management*. Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh *tax* dan *firm size* terhadap *earnings management*. [7].

5. Rudy Hendrata, Lasmanita Rajagukguk

Rudy Hendrata, Lasmanita Rajagukguk melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan total sampel diambil sebanyak 49 perusahaan berdasarkan kriteria dan harus memenuhi semua kriteria. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan

Perencanaan pajak, aset pajak tangguhan dan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan aset pajak tangguhan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba [8].

6. Teguh Erawati, Nurma Ayu Lestari

Teguh Erawati Nurma Ayu Lestari melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Kualitas Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan total sampel diambil sebanyak 48 perusahaan berdasarkan kriteria dan harus memenuhi semua kriteria. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak (*tax planning*), kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [10].

7. Tutik Avrinia Wulansari

Tutik Avrinia Wulansari melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba”. Objek penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda, pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan total sampel diambil sebanyak 10 perusahaan berdasarkan kriteria dan harus memenuhi semua kriteria. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba [11].

8. Veni Zakia, Nur Diana, M. Cholid Mawardi

Veni Zakia, Nur Diana, M. Cholid Mawardi melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Manajemen Laba dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan total sampel diambil sebanyak 22 perusahaan berdasarkan kriteria dan harus memenuhi semua kriteria. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba sedangkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. *Good corporate governance* dengan proksi komite audit tidak berpengaruh terhadap kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage*, dan profitabilitas dengan manajemen laba. *Good corporate governance* dengan proksi komite audit memperlemah pengaruh ukuran perusahaan pada manajemen laba. *Good corporate governance* dengan proksi komite audit memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan pada manajemen laba [9].

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|---|--|---|---|
| Fibria Anggraini Puji Lestari (2018) [5] | Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Manajemen Laba | <u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Laba <u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. Beban Pajak Tanggungan | <u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas dan beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba. <u>Secara Parsial:</u> Profitabilitas dan beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. |

Tabel 2.1 Sambungan

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|---|---|--|---|
| Hendy Suyoto, Susi Dwimulyani (2019) [4] | Pengaruh <i>Leverage</i> dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi | <u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Laba <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Leverage</i> b. Perencanaan Pajak <u>Variabel Moderasi:</u> Profitabilitas | <u>Secara Simultan:</u> <i>Leverage</i> dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. b. Perencanaan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. c. Profitabilitas memperlemah pengaruh negatif <i>leverage</i> terhadap manajemen laba. d. Profitabilitas tidak memoderasi hubungan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba. |
| Irsan Lubis, Suryani (2018) [6] | Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) | <u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Laba <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Tax Planning</i> b. Beban Pajak Tangguhan c. Ukuran perusahaan | <u>Secara Simultan:</u> <i>Tax planning</i> , beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Tax planning</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. b. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. |
| Lindira Sukma Dewi, I Ketut Budiarta, I.D.G Dharma Suputra (2017) [7] | Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi Pengaruh <i>Tax</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Firm Size</i> pada <i>Earnings Management</i> | <u>Variabel Dependen :</u> <i>Earnings Management</i> <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Tax</i> b. <i>Leverage</i> c. <i>Firm Size</i> <u>Variabel Moderasi:</u> Kebijakan Dividen | <u>Secara Simultan:</u> <i>Tax</i> , <i>Leverage</i> dan <i>firm size</i> berpengaruh terhadap <i>earnings management</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Tax</i> , <i>leverage</i> dan <i>firm size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>earnings management</i> . b. Kebijakan dividen memoderasi dan memperkuat pengaruh positif <i>leverage</i> terhadap <i>earnings management</i> . c. Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh <i>tax</i> dan <i>firm size</i> terhadap <i>earnings management</i> . |

Tabel 2.1 Sambungan

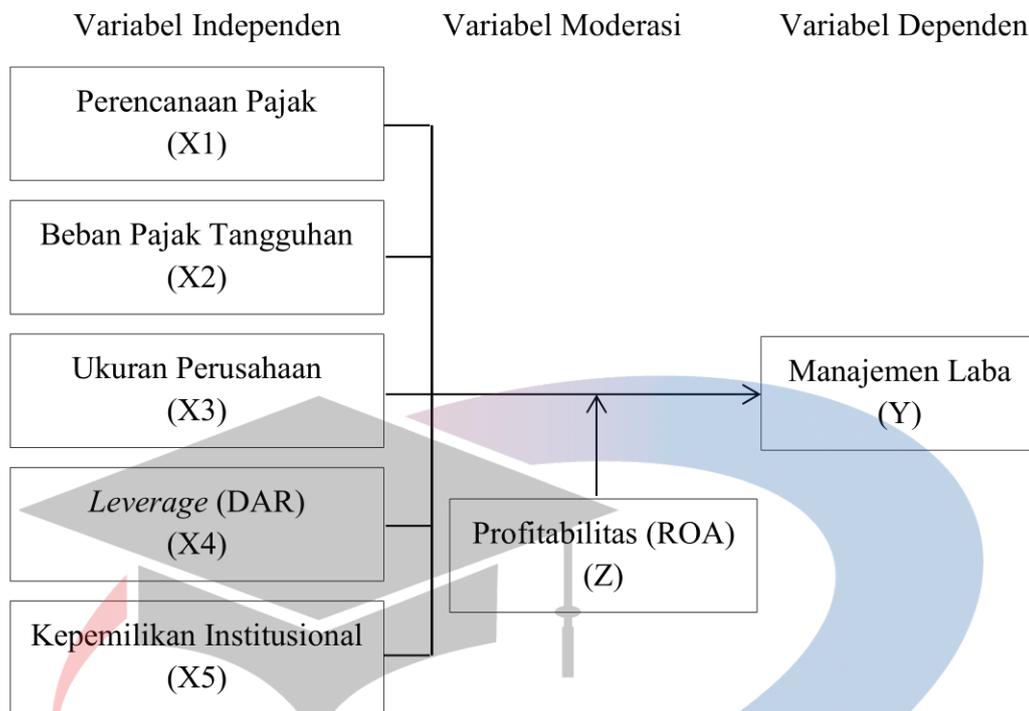
| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|--|--|---|--|
| Rudy Hendrata, Lasmanita Rajagukguk (2017) [8] | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015) | <u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Laba <u>Variabel Independen :</u> a. Perencanaan Pajak b. Aset Pajak Tangguhan c. <i>Leverage</i> | <u>Secara Simultan:</u> Perencanaan pajak, aset pajak tangguhan dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen laba. <u>Secara Parsial :</u> a. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. b. Aset pajak tangguhan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| Teguh Erawati Nurma Ayu Lestari (2019) [10] | Pengaruh Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>), Kualitas Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017) | <u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Laba <u>Variabel Independen :</u> a. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) b. Kualitas Audit c. Kepemilikan Institusional | <u>Secara Simultan:</u> Perencanaan pajak (<i>Tax Planning</i>), kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. <u>Secara Parsial:</u> a. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) berpengaruh positif terhadap manajemen laba. b. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. c. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. |
| Tutik Avrinia Wulansari (2019) [11] | Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba | <u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Laba <u>Variabel Independen :</u> a. Perencanaan Pajak b. Beban Pajak Tangguhan c. Ukuran Perusahaan | <u>Secara Simultan:</u> Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. <u>Secara Parsial:</u> a. Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. b. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |

Tabel 2.1 Sambungan

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|---|--|---|---|
| Veni Zakia, Nur Diana, M. Cholid Mawardi (2019) [9] | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Manajemen Laba dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderating | <p><u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Laba</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Kepemilikan Manajerial b. Kepemilikan Institusional c. Ukuran Perusahaan d. <i>Leverage</i> e. Profitabilitas f. Pertumbuhan Penjualan</p> <p><u>Variabel Moderasi:</u> <i>Good Corporate Governance</i> dengan proksi komite audit</p> | <p><u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, profitabilitas, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. b. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. c. <i>Good corporate governance</i> dengan proksi komite audit tidak berpengaruh terhadap kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>leverage</i>, dan profitabilitas dengan manajemen laba d. <i>Good corporate governance</i> dengan proksi komite audit memperlemah pengaruh ukuran perusahaan pada manajemen laba e. <i>Good corporate governance</i> dengan proksi komite audit memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan pada manajemen laba.</p> |

2.3 Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual pada penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah manajemen laba. Sedangkan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah profitabilitas diproksikan dengan *return on assets ratio*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan, *leverage* diproksikan dengan *debt to assets ratio*, dan kepemilikan institusional.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah aturan yang ada tanpa melawan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga menghasilkan utang pajak serendah mungkin. Semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba [4].

Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba akan meningkat apabila profitabilitas meningkat, dan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba akan menurun apabila profitabilitas menurun. Ini karena jika profitabilitas perusahaan tinggi maka perencanaan pajak juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1_a: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

H2_a: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba

2.4.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpuhkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan [22]. Semakin tinggi beban pajak tangguhan maka akan menurunkan laba perusahaan sehingga memotivasi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen [5].

Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba akan meningkat apabila profitabilitas meningkat, dan pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba akan menurun apabila profitabilitas menurun. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menunjukkan laba perusahaan yang tinggi. Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak mendorong manajemen perusahaan akan memanfaatkan celah dengan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar. Nilai beban pajak

tanggungan yang semakin tinggi akan mengakibatkan profitabilitas perusahaan yang melakukan manajemen laba juga semakin tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1_b: Beban Pajak Tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba

H2_b: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara beban pajak tanggungan dengan manajemen laba

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan *Ln (total Aset)*. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko yang akan timbul dari berbagai situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan besar mempunyai risiko yang besar sehingga memotivasi manajemen perusahaan melakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan menjelaskan tentang jumlah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang disajikan melalui total aset perusahaan. Semakin besar total aset perusahaan berarti semakin besar pula ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan perusahaan besar menarik perhatian yang lebih dari investor sehingga mendorong perusahaan melaporkan laba yang baik. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba [6].

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba akan meningkat apabila profitabilitas meningkat, dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba akan menurun apabila profitabilitas menurun. Perusahaan yang cenderung besar dilihat dari total aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki aset yang besar menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Hal ini akan membuat perusahaan berusaha untuk menunjukkan laba yang baik agar dapat memperoleh kepercayaan dari pihak kreditur, dan akan semakin kuat keinginan perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1_c: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

H2_c: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba

2.4.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Laba dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi *debt to assets ratio*. *Debt to assets ratio* menunjukkan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Rasio *leverage* digunakan oleh perusahaan untuk mengukur sejauh mana aktiva dalam perusahaan di biayai oleh hutang. Rasio ini akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka kemungkinan manajemen perusahaan melakukan manajemen laba akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan akan terancam pelanggaran perjanjian hutang jika tidak mampu untuk memenuhi hutangnya sehingga perusahaan akan berusaha untuk melunasi hutangnya. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba [7].

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar pula hutang suatu perusahaan dibandingkan dengan asetnya, maka semakin besar resiko yang dihadapi oleh perusahaan karena terancam tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Profitabilitas yang tinggi dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat terhindar dari risiko perusahaan terkait dengan kegagalan pelunasan hutang. Hal ini akan mendorong motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1_d: *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba

H2_d: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara *leverage* dengan manajemen laba

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki institusional dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut. Hal ini berarti bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh institusi keuangan dan institusi lainnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses pengawasan secara efektif sehingga dapat mengurangi motivasi manajemen

perusahaan melakukan manajemen laba. Semakin besar kepemilikan institusional akan menunjukkan pengawasan yang lebih ketat, sehingga manajemen perusahaan dituntut untuk lebih bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan keuangannya. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba [9].

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba akan meningkat apabila profitabilitas meningkat, dan pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba akan menurun apabila profitabilitas menurun. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepemilikan institusional. Dengan adanya keterlibatan kepemilikan saham institusi, akan mendorong manajemen perusahaan agar meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan mengurangi motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba, karena manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan suatu keputusan yang nantinya dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1_e: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

H2_e: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba

UNIVERSITAS
MIKROSKIL